BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dalam perjalanan sejarahnya,angkutan kereta api ditanah air membuktikan peranan nya yang sangat berarti pada sektor perhubungan, disamping menunjang pertumbuhan ekonomi terutama disektor pertanian, perkebunan dan pertambangan alat transportasi darat ini sangat lah dibutuhkan bagi masyarakat pada umumnya.

Perkeretaapian di Indonesia mulai berperan sejak tanggal 17 juni 1984, pada waktu itu gubernur Jendral Belanda Mr. L.A Baron Sloer Van De Beele meresmikan lintasan kereta api kamijen-tanggung sepanjang 26KM. empat tahun kemudian lintasan kereta ini dioprasikan oleh NISM (*Nederland Indishe Spoorwegh Maatchapy*), sebuah perusahaan kereta api swasta milik pemerintah Hindia Belanda. Motivasi pendirian perusahaan ini oleh colonial belanda adalah sebagai sarana logistic untuk kepentingan strategis perang dan untuk menunjang perdagangan unutk memenuhi kebutuhan ekonomi colonial Belanda. Kehadiran kereta api dalam lintasan ini mengundang beberapa perusahaan kereta api lainnya unutk membuka jaringan kereta api, sehingga terdapat kurang lebih 12 buah perusahaan kereta api milik swasta dan satu buah perusahaan milik pemerintah. Sampai akhir perang dunia ke II di Indonesia telah terdapat kurang lebih 6.458 jaringan jalan kereta api,dan pada tahun 1895 jaringan kereta api telah disebar di jawa, mdura, Sumatra dan Sulawesi.

Pada masa kependudukan jepang, seluruh jaringan kereta api milik Belanda (pemerintah swasta) dikuasi oleh jepang dengan nama “Riyuku Kyoko” dan kembali menjadi “Tetsudo Kyoko” yang berkantor pusat di Bandung, sedangkan disumatra disebut “Tetsudo Tai” yang berkantor di bukit tinggi.

Pada tanggal 27 september 1949 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Pengumuman Pemerintah No. 2 yang isinya menyatakan bahwa DKA RI dan SS/VS digabungkan menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan kereta api (DKA). Dengan diundangkanya UU No. 19 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha milik Negara yang mengatur landasan hokum pendiriannya kemudian dengan PP No.22 tahun 1963, DKA berubah menjadi perusahaan Negara Kereta Api (PNKA).

Selanjutnya denga PP No.1 tahun 1971, maka bentuk usahanya dialihkan dari PNKA menjadi Perusahaan Jawatan (perjan) yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Setelah berubah nama menjadi PJKA mak kurang dari 20 tahun kemudian yaitu pada tanggal 31 Oktober 1990 dengan PP No. 57 tahun 1990, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) yang ditanda tangani oleh Presiden Soeharto pada masa itu, tanggal 30 oktober 1990 maka status Perusahaan Jawatan diganti menjadi Perum.

Setelah melayani masyarakat umum dengan berbagai jenis pelayanan yang dilakukan maka 9 tahun kemudian Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) mengganti nama menjadi PT. Kereta Api Indonesia (persero).

Status baru tersebut merupakan peluang umtuk meningkatkan kondisi perusahaan dengan peningkatan pelayanan yang akan lebih baik dari segi pelyanan teknis maupun operasional.

2.2 Struktur Organisai Perusahaan

Struktur organisasi tingkat pusat yang merupakan struktur organisai garis dan staff berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Darat No. 8 tahun 1991 SK Direksi PERUMKA No. KA/DT/30000/SK 1991 terdiri atas :

a) Direksi yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama
b) Direktorat-direktorat yang terdiri dari :
    - Direktorat Keuangan
    - Direktorat Teknisi
    - Direktorat operasi
    - Direktorat Personalia dan Umum
    - Direktorat pengembangan Usaha
c) Pusat-pusat yang terdiri:
    - Pusat Perencanaan dan Pengembangan
    - Pusat Pendidikan dan Pelatihan
    - Pusat logistic
d) Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Berdasarkan SK Direksi nomor : II?DT/.003/1/4/KA.2001 tanggal 2 januari 2001 susunan organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 2 Bandung adalah sebagai berikut :

a) Seksi Keuangan, yang terdiri atas :
    - Sub seksi Keuangan
    - Sub seksi Anggaran dan Akuntansi
b) Seksi SDM dan Umum
    - Sub seksi SDM
    - Sub seksi KRT dan Umum
    - Sub seksi Hukum
    - Sub seksi Hiperkes dan Keselamatan Kerja
c) Seksi Operasional dan Pemasaran, yang rediri dari :
    - Sub seksi Operasi Teknis (OPNIS)
    - Sub seksi Perjalanan Kereta Api (OPKA)
    - Sub seksi Sub seksi Pemasaran Angkutan Penumpang
    - Sub seksi Pemasaran Angkutan Barang
    - Sub seksi Keamanan dan Ketertiban
d) Seksi Jalan Rel dan Jembatan,yang terdiri dari :
    - Sub seksi Program
    - Sub seksi Jalan rel
    - Sub seksi Jembatan
e) Seksi Traksi
    - Sub seksi Lokomotif
    - Sub seksi Kereta/Gerbong

- Sub seksi Program

f) Seksi sinyal Telkom dan Listrik,yang terdiri atas:

- Sub seksi Program
- Sub seksi Sinyal
- Sub seksi Telkom

g) Seksi Properti

- Sub seksi Program
- Sub seksi Tanah
- Sub seksi Bangunan

h) Pemeriksaan daerah

- Sub seksi Tata Usaha
- Sub seksi Pemeriksa Stasiun (PMBS)

2.3 Tugas Perusahaan

Dalam melaksanankan kegiatan perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (persero) yang bergerak dibidang pelayanan jasa angkut khusunya transportasi darat hendak nya melaksanakan tugas dengan baik. Sesuai dengan keputusan menteri Prhubungan No. 8 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata kerja PT. Kereta Api Indonesia (persero) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengusahaan pelayanan jasa kereta api dalam rangka melancarkan arus perpindahan orang dan atau barang secara masl guna menunjang pembangunan nasional.

2.4 Kegiatan perusahaan

Dibawah ini dijelaskan secara singkat tentang aktivitas perusahaan PT. Kerta Api Indonesia (persero), yaitu mengenai kegiatan PT. Kereta Api Indonesia (persero) .PT. Kereta Api Indoensia (persero) untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional khusunya dibidang transportasi,yaitu dengan menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi . kegiatan perawatran prasaranan perkeretaapian , pengusaha prasarana perkereta apian, dan pemanfaatan umum dengan menerapkan prinsip prinsip perseorangan terbatas.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Usaha pengangkutan orang atau barang dengan kereta api.
2. Usaha angkutan pra dan purna angkutan kereta api dan bongkar muatan.
3. Usaha menyediakan sarana dan prasarana kereta api
4. Pengoprasian prasarana kereta api
5. Usaha penyewa sarana dan prasarana serta fasilitas kereta api
6. Usaha perawata kereta api
7. Jasa konsultasi perawatan perkereta apian
8. Jasa pemborongan perawatan perkereta apian

9. Jasa pengadaan barang dan jasa lainya yang berkaitan dengan perawatan perkeretaapian
10. Usaha pemanfaatan Tanah, Bangunan, fasilitas jasa dan keahlian dibidang perkeretaapian.
11. Usaha pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan

